

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2024**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024**



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) serta rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI Penutup

3. Mengubah lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, sehingga sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

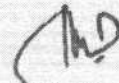
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 9 Agustus 2024

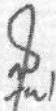
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



RUSMIANI PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
NOMOR : 35



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan karuniaNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA. 2024 ini didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 -2026. Hal ini bertujuan untuk menetapkan dan merumuskan prioritas program dan kegiatan disertai pagu indikatif pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sesuai visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA. 2024 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (P-RKA-PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan kontribusinya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja TA 2024. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) TA. 2024 masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak untuk kemajuan dan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini.

Akhir kata semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dapat melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Sei Rampah, 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PENETAP UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang.....	1
2.2 Landasan Hukum	1
2.3 Maksud dan Tujuan	2
2.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan II.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
2.4 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja	12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	12
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	13
BAB IV PENUTUP	14



BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perkembangan yang dimaksud meliputi capaian program, kebutuhan dalam hal kesinambungan pelayanan administrasi kependudukan dan pelaksanaan inovasi yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan pada RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024, dan berdasarkan evaluasi rencana kerja tahun 2024 pada triwulan I dan II, terdapat beberapa capaian indikator program yang belum tercapai diperlukan perubahan sistematis dalam penyusunan rencana kerja tahun 2024. Pararel dengan hal tersebut maka diharuskan untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (P-RKPD) dimana tiap OPD juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja).

2.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Noor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran; Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi kKlasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024.

2.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Sebagai penjabaran rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
4. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan event-event nasional, kebutuhan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai maupun perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan yang diakibatkan oleh faktor kebutuhan terkait dengan Pelayanan Minimal.

2.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Kerja dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja TW II Tahun 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan I dan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup



BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I dan II

Evaluasi Renja sampai kepada Triwulan ke dua ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 di Renja 2024 diberikan pagu indikatif sebesar Rp. 10.069.070.242,-, dimana komposisi Dana Hibah Polres dalam rangka Pengamanan Pilkada sebesar Rp. 4.500.000.000,- dan DAU sebesar Rp. 5.569.070.242,-

Anggaran tersebut dianggarkan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggran yang ditetapkan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, direncanakan terdiri dari 3 Program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dan berdasarkan pembahasan KUA PPAS maka pada DPA 2024 hanya terdapat 3 Program, 13Kegiatan dan 39 sub Kegiatan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berupaya melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu mengingat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV dimana Kabupaten Serdang Bedagai akan menghadapi Pemilukada dan Pemberantasan Cukai Ilegal. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan TW II dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. II.1
Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I dan II TA. 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
				5			6			7	
1	2	3	4	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.99	Nilai	7.373.969.197	72.99	Nilai	3.980.674.455	100	53.98
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2.656.500	0	%	0	0	0
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2	Dokumen	1.595.000	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.061.500	0	Laporan	0	0	0
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	100	%	2.827.323.721	80	%	1.785.502.426	80	63.15
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	Orang/bulan	2.746.103.721	21	Orang/bulan	1.762.382.426	100	64.18
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	81.220.000	0	Dokumen	23.120.000	0	28.47



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100	%	85.674.576	80	%	44.042.029	80	51.41
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.801.450	1	Paket	12.801.450	100	100
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.418.266	1	Paket	13.524.300	100	82.37
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	10.182.000	1	Paket	8.322.000	100	81.73
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	1	Paket	1.836.360	0	Paket	0	0	0
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	5.290.000	0	Paket	0	0	0
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	2.372.500	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	36.774.000	1	Laporan	9.394.279	8.33	25.55
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	4.000.000	100	%	4.000.000	100	100



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	4.000.000	1	Unit	4.000.000	100	100
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	%	4.019.800.000	50	%	1.973.300.000	50	49.09
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	3.000.000	100	100
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	4.800.000	0	Laporan	0	0	0
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4.012.000.000	1	Laporan	1.970.300.000	100	49.11
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	434.514.400	50	%	173.830.000	50	40.01
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	38.420.000	1	Unit	27.025.000	100	70.34
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	376.156.400	11	Unit	136.565.000	100	36.31



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	2.748.000	0	Unit	0	0	0
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	17.190.000	15	Unit	10.240.000	55.56	59.57
2	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100	%	557.743.545	100	%	60.880.000	100	10.92
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	%	0	180	0	0	200	0
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100	%	474.075.545	50	%	50.910.000	50	10.74
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20	Laporan	150.275.000	2	Laporan	50.910.000	10	33.88



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pene	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Laporan	37.950.000	0	Laporan	0	0	0
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	261.500.000	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	15.500.000	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	100	Orang	7.525.000	0	Orang	0	0	0



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	1.325.545	0	Laporan	0	0	0
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	%	55.768.000	90	%	9.970.000	100	17.88
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	0
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	22.260.000	3	Laporan	9.970.000	25	44.79
	1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan	33.508.000	0	Laporan	0	0	0
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan PPNS	100	%	27.900.000	0	%	0	0	0



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
				1	Laporan	27.900.000	0	Laporan	0	0	0
3	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	100	%	124.207.500	100	%	13.295.000	100100	10.7
			Persentase pelayanan pemadam kebakaran	100	%	0	200	0	0	200	0
			Persentase pelayanan non kebakaran	30	%	0	20	0	0	66.67	0
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebaka	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	100	%	83.994.000	50	%	11.195.000	50	13.33
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Pananggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	1	Dokumen	9.360.000	1	Dokumen	2.420.000	100	25.85



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.04.2.01.0 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	17.700.000	1	Laporan	7.050.000	8.33	39.83
	1.05.04.2.01.0 3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	Dokumen	9.000.000	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.04.2.01.0 4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	2.250.000	0	Dokumen	0	0	0
	1.05.04.2.01.0 5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (setiap Tahun), Sah, dan Legal	1	Dokumen	4.500.000	1	Dokumen	1.725.000	100	38.33



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	6	Unit	26.630.000	0	Unit	0	0	0
	1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan Analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	4	Orang	14.554.000	0	Orang	0	0	0
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	100	%	9.000.000	50	%	2.100.000	50	23.33
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	Dokumen	9.000.000	1	Dokumen	2.100.000	8.33	23.33
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pembentukan Relawan di desa/ Kelurahan	30	%	27.613.500	20	%	0	66.67	0
	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	17	Desa/ Kelurahan	27.613.500	0	Desa/ Kelurahan	0	0	0



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024(%)	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pelayanan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	%	3.600.000	0	%	0	0	0
	1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	6	Laporan	3.600.000	0	Laporan	0	0	0
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						8.055.920.242,00			4.054.849.455		50,33 %



Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja masih banyak yang belum tercapai, sementara capaian anggaran masing di angka 50.33%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan percepatan dan penyesuaian target kinerja

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024.

Adapun pencapaian IKU sampai dengan TW 2 Tahun 2024, yaitu :

Tabel. II.2
Capaian IKU Triwulan I dan II TA. 2024

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun		
			2023	2024	
			Realisasi	Target	Realisasi
A.	Indikator Tujuan				
1.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	0.975	0.98	0.8
B.	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1.	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95	95	60
2.	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	%	100	100	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	72.99	72.99

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, maka isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu :

1. Pengamanan penyelenggaraan kegiatan nasional seperti Pon Aceh Sumut, Pilkada Serdang Bedagai
2. Penyediaan sarana dan prasarana trantibum dan pemadam kebakaran
3. Pencapaian target dalam DBHCHT yang dilakukan melalui sosialisasi dan operasi bersama gempur rokok ilegal



2.4 Review terhadap Perubahan Rencana Kerja

- a. Perubahan Rencana Kerja disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD tahun 2024
- b. Target kinerja pada setiap indikator kinerja tahun 2024 mengalami perubahan sesuai dengan target pencapaian yang akan dicapai
- c. Perubahan Rencana Kerja dalam mendukung kondisi aman dan tertib pada masa Pilkada Serdang Bedagai

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan belum dilakukan dikarenakan sampai Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun belum ada usulan program dan kegiatan Masyarakat yang diusulkan.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU-APBD Tahun 2024. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : (terlampir).

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJEF AJUUR PERIODE REVISI GPD	REALISASI CAPAIAN REVISI TAHUN 2022	PRAKUALAN CAPAIAN TARJEF REVISI TAHUN 2023	CAPAIAN KEBERJAYAAN DAN KENAIKATAN PENGARAH										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		PELOPOR SABARAN	PRAKUALAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT SABARAN PERANGKONG JAWAB
							TARJEF 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Berkas/berkas/berkas (15-12)			NASIONAL			DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEBESAR	RKPD 2024	APRO 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	13											14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Pekar Bahas Logos Kantor yang Diadatkan				1 Pekar	1 Pekar	11.881.390,00	1.836.390,00	1.836.390,00	-9.895.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Pekar Barang Cetak dan Pengiriman yang Diadatkan				1 Pekar	2 Pekar	42.250.000,00	5.290.000,00	10.084.000,00	-32.166.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan yang Diadatkan				5 Dokumen	9 Dokumen	5.568.000,00	2.372.000,00	0,00	-3.196.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD				12 Laporan	12 Laporan	205.568.000,00	35.774.000,00	48.678.000,00	-160.890.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang M&S Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang M&S Daerah				100 %	100 %	67.425.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	-63.430.000,00				Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban	Senas dan Prasana Satpol PP	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan				4 Unit	1 Unit	38.370.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	-34.270.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadatkan				2 Unit	0 Unit	29.050.000,00	0,00	0,00	-29.050.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	121.962.750,00	4.615.800.000,00	-4.634.800.000,00	3.502.937.250,00				Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban	Apaar Satpol PP	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Sakat Menyunt	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sakat Menyunt				1 Laporan	1 Laporan	11.492.750,00	3.000.000,00	6.000.000,00	-5.482.750,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadatkan				1 Laporan	1 Laporan	49.300.000,00	4.800.000,00	6.500.000,00	-42.800.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadatkan				1 Laporan	1 Laporan	61.200.000,00	4.012.800.000,00	-4.012.800.000,00	3.950.000.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang M&S Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang M&S Daerah				100 %	100 %	704.098.800,00	434.514.400,00	683.804.400,00	-64.294.400,00				Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban	Senas dan Prasana Satpol PP	687.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Oras atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Oras atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Operatif dan Aksesibel Pajayes				1 Unit	1 Unit	40.425.000,00	35.425.000,00	40.620.000,00	0,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Operatif dan Aksesibel Pajak dan Perizinan				11 Unit	11 Unit	693.032.800,00	376.116.400,00	598.946.400,00	-130.886.400,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Operatif dan modern				1 Unit	3 Unit	10.678.000,00	2.748.000,00	52.748.000,00	42.070.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Operatif dan modern				33 Unit	27 Unit	23.250.000,00	17.190.000,00	17.190.000,00	-6.050.000,00	Kab. Serang Badang, Serang Kecamatan, Serang Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
2	1.05.01	PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMBAHAN DAN KETERTAMBAHAN UMUM	Persentase Genggam Ketertammban yang Diabaikan Persentase Perle Perle yang diabaikan				100 95 %	100 95 %	6.030.624.930,00	557.743.545,00	329.963.545,00	-4.303.824.830,00				Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Bina Damban 7. Bina Damban			733.000.000,00				
1.05.02.2.01		Pengembangan Genggam Ketertammban dan Ketertammban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Genggam Ketertammban yang Diabaikan				100 %	100 %	4.697.167.030,00	474.075.545,00	221.575.545,00	-4.575.592.365,00				Mempenuhi Stabilitas Publikasi/Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Ekamud Bureas Sang 5. Ekamud Bureas Sang	Mayasat	537.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.05.02.2.01.0008		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertammban dan Ketertammban Umum serta Peningkatan Mayasat Tingkat Kabupaten/Kota																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JAWA PERIODE REVISI DPR	REALISASI CAPAIAN REVISI DPR TAHUN 2022	PRAKARAA CAPAIAN TARGET REVISI DPR TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN										KELOMPOK SABARAN	PRAKARAA MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT SABARAN PENGANGKAT JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlebih/burukkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							REBELUN BERGUAH	RKPD 2024	APMD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAIRAH						
																5			9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemerintahan dan Peningkatan Kemampuan Koneksi Mendukung Masyarakat/Pengembangan dan Zona yang Baik dan Lain				1 Laporan	0 Laporan	41.230.000,00	0,00	0,00	-41.230.000,00	Kab. Serdang Badag, Sumed Kecamatan, Sumed Kal/Dewa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LAM-AM	Mempertah Stabilitas Publikasi dan Transformasi Publikasi Publik	5. Ekonomi Berdaya Sang 6. Ekonomi Berdaya Sang		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
JUMLAH									10.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	-41.230.000,00							12.000.000,00		



BAB IV

PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2024 disusun, dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 penyusunannya dilakukan berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah disusun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Terdapat beberapa kegiatan yang diprioritaskan dalam rangka percepatan pencapaian target pada tahun keempat sesuai dengan visi dan misi pembangunan kepala daerah periode 2021-2026

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dalam menyingkapi perubahan peraturan serta jabatan kepala daerah periode selanjutnya, maka rancangan awal renja ini dapat menjadi gambaran dan dapat memberikan usulan melakukan penyesuaian sehingga kedepannya dapat menyusun program dan kegiatan Rencana Kerja Anggaran 2024 serta tertuang dalam DPA TA. 2024 sehingga dapat terjabarkan dan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan di Tahun 2024 dengan harapan dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat serta terukur pencapaiannya.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) TA 2024 disusun dan kiranya dapat menjadi petunjuk dalam penyusunan P-RKA dan P-DPA TA 2024.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001